

DAMPAK PROGRAM UPAYA KHUSUS PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (UPSUS PAJALE) TERHADAP TINGKAT KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MALANG

IMPACT OF SPECIAL EFFORTS RICE, CORN, AND SOYBEAN PROGRAM ON LEVEL OF FOOD SECURITY IN MALANG REGENCY

Wenang Hidayatulloh^{1*}, Djoko Koestiono

^{1*}Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

*Penulis korespondensi: wenang@student.ub.ac.id

ABSTRACT

Food security in some area can be measured by Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA is measured with three aspects which are food availability, accessibility, and utilization aspects. Based on FSVA of East Java 2018, there are 3 sub-districts in Malang Regency in insecurity condition. Food security problems in Malang Regency are low rice land area, poverty, and low clean water availability. One of efforts to solve these problems are with Special Efforts Rice, Corn, and Soybean Program. To determine the impact of this program on levels food security by using FSVA and the differences between sub-districts participating in the UPSUS PAJALE activity and sub-districts that did not participate. This study is aim to describe food security level in Malang Regency and analyze impact of Special Efforts Rice, Corn, and Soybean Program on food security level in Malang Regency. The data analysis method used is the analysis of the Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) in the form of individual indicator analysis, composite analysis, spatial analysis, and descriptive analysis. Overall, the condition of food security in Malang Regency in 2018 and 2019 is included in priority 4 (resistant condition), so there is no significant change, but there are no sub-districts included in priority 1 or very food vulnerable. The UPSUS PAJALE program is also able to maintain the level of food security in 2018-2019 which is included in priority 4 (somewhat resistant), but has not increased the level of food security.

Keywords: Food Security, Food Security Level, FSVA, UPSUS PAJALE

Ketahanan pangan di suatu daerah dapat diukur menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penilaian ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek, aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan hasil FSVA Provinsi Jawa Timur 2018, terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Malang yang masuk dalam kategori rawan pangan. Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Malang luas lahan, kemiskinan, dan ketersediaan air bersih. Salah satu upaya untuk mengatasi ketahanan pangan dengan Program Upaya Khusus Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE). Untuk mengetahui dampak program ini terhadap tingkat ketahanan pangan dengan menggunakan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dan perbedaan antara kecamatan yang mengikuti kegiatan UPSUS PAJALE dengan kecamatan yang tidak mengikutinya. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat ketahanan pangan tingkat kecamatan di Kabupaten Malang dan Menganalisis dampak Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (PAJALE) terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yang berupa analisis indikator individu, analisis komposit, Analisis Spasial, dan Analisis Deskriptif. Secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Malang pada tahun 2018 dan 2019 masuk

ke dalam prioritas 4 yang berarti agak tahan, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan, namun tidak ada kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 atau sangat rentan pangan. Program UPSUS PAJALE juga mampu mempertahankan tingkat ketahanan pangan pada tahun 2018-2019 masuk dalam prioritas 4 (agak tahan), namun belum meningkatkan tingkat ketahanan pangan.

Kata kunci: Ketahanan pangan, Tingkat ketahanan pangan, FSVA, UPSUS PAJALE

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan bagi kehidupan keseharian manusia, dan manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan ini. Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peranan kandungan gizi di dalamnya penting bagi peningkatan kecerdasan dan kualitas hidup untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif yang sebagaimana disebutkan dalam definisi ketahanan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2019). Oleh karena itu, kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi positif dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan pangan di suatu daerah dapat diukur menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penilaian ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan dapat dilihat dari kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk impor dan bantuan pangan) adalah kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Aspek akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui berbagai sumber, seperti produksi dan persediaan sendiri (pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan). Aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan setiap anggota keluarga (Badan Ketahanan Pangan, 2019).

Masalah ketahanan pangan meningkat di sebagian besar di kota dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan hasil FSVA Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas*) tahun 2018, sebanyak 81 kabupaten dari 416 kabupaten (19 %) dan 7 kota dari 98 kota (7,14 %) masuk dalam kategori rentan terhadap kerawanan pangan. Karakteristik kabupaten rentan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, presentase balita *stunting* tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi, sedangkan karakteristik kota rentan dilihat dari pengeluaran pangan yang tinggi, ketersediaan air bersih yang rendah, dan balita *stunting* yang tinggi (Badan Ketahanan Pangan, 2019). Berdasarkan hasil FSVA Provinsi Jawa Timur 2018, terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Malang yang masuk dalam kategori rawan pangan, yaitu Kecamatan Gondanglegi, Pakis dan Kedung Kandang (BKP, 2018). Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Malang rendahnya luas lahan, kemiskinan, dan ketersediaan air bersih.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan adalah dengan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE). UPSUS PAJALE bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanamam (IP) dan produktivitas lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan rawa leak untuk mendukung pencapaian Swasembada Berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai dan ketahanan pangan. Dalam rangka pencapaian swasembada pangan khususnya padi, jagung dan kedelai

maka dilaksanakannya program ini melalui kegiatan: (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), (2) Penyediaan alat dan mesin pertanian, (3) Penyediaan dan penggunaan benih unggul, (4) penyediaan dan penggunaan pupuk berimbang, (5) Pengaturan musim tanam, dan (6) Pelaksanaan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) (Nurlaili, 2019). Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang menerapkan program ini. Kegiatan UPSUS PAJALE dilakukan di Kabupaten Malang dengan jumlah luasan 110 hektar yang dilaksanakan di Kecamatan Donomulyo (60 ha), Kecamatan Pagak (50 ha), Kecamatan Singosari (58 ha) dan Kecamatan Karangploso (25 ha). Dengan adanya kegiatan ini setidaknya hanya empat kecamatan yang mengikuti, sedangkan 29 kecamatan yang lainnya tidak mengikuti program tersebut. Dari hasil kegiatan UPSUS PAJALE, program ini mempengaruhi peningkatan produksi di Kecamatan Donomulyo. Produksi padi di Kecamatan Donomulyo mengalami peningkatan pada tahun 2015 produksi padi sebanyak 34.403 ton menjadi 37.244 ton pada tahun 2018.

Upaya dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dilakukan dengan pelaksanaan UPSUS PAJALE di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengetahui dampak program ini terhadap tingkat ketahanan pangan dengan menggunakan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dan perbedaan antara kecamatan yang mengikuti kegiatan UPSUS PAJALE dengan kecamatan yang tidak mengikutinya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan tingkat ketahanan tingkat kecamatan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 dan 2018 dan 2) Menganalisis dampak Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan dan dampak UPSUS Pajale terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh (Masitoh dan Ratnasari, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik status ketahanan pangan, memodelkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketahanan di Jawa Timur menggunakan metode regresi probit biner dan membandingkan hasil prediksi model dengan klasifikasi status ketahanan pangan aktual. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah presentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan angka harapan hidup. Diperoleh ketepatan klasifikasi sebesar 93,103 persen dan nilai *Pseudi R² McFadden* sebesar 74,6 persen. Kabupaten yang masuk dalam ketahanan pangan sedang mayoritas berada di Provinsi Jawa Timur bagian timur.

Terdapat juga penelitian dilakukan oleh (Wijaya, *et al*, 2016) mengenai Analisis Daerah Rawan Pangan dengan Pendekatan *Geographical Information System* (GIS) di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator komposit menunjukkan bahwa tidak ada satupun kelurahan yang mengindikasikan kondisi kategori rawan pangan. Dengan demikian secara keseluruhan mengindikasikan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kota Probolinggo sudah baik. Dari 29 kelurahan terdapat 6 kelurahan yang berada pada kondisi cukup tahan, sedangkan 23 kelurahan lain termasuk dalam kategori tahan pangan.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan wilayah penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan dalam segi metode penelitian, yaitu analisis spasial dengan *Geographical Information System* (GIS) dan indikator yang digunakan, yaitu rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa, rasio jumlah saranan dan prasaranan ekonomi terhadap jumlah rumah tangga, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses bersih terhadap jumlah

rumah tangga desa, dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa. Selain itu dalam penelitian ini mengkaitkan dampak Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai terhadap keberlanjutan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang. . Pemilihan metode penelitian analisis spasial dengan GIS dan penggunaan metode FSVA dengan enam indikatornya dikarenakan metode ini lebih mudah jika dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, selain itu juga adanya kemudahan akses data terkait enam indikator, dan keterkaitan dampak Program UPSUS PAJALE sebagai tambahan dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Wilayah studi penilitan ini adalah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data skunder yang didapat dari Badan Pusat Statistika Pusat dan Kabupaten Malang, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, dan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Semua data yang digunakan pada tahun 2017-2019. Data yang dibutuhkan adalah data yang terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan dengan enam indikator dan data tambahan lainnya. Data yang digunakan adalah data perkecamatan yang didasari dari 6 indikator, yaitu rasio luas baku lahan sawah, rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, desa yang tidak memiliki akses penghubung, dan rasio jumlah rumah tangga, selain itu juga ada data produksi, produktivitas, dan luas lahan padi di Kabupaten Malang.

Permasalahan yang terjadi yaitu tidak maksimalnya data yang didapatkan dalam penelitian ini. Dalam pengukuran tingkat ketahanan pangan tingkat kabupaten menggunakan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) lebih baik menggunakan data per desa, namun dipenelitian ini hanya menggunakan data perdesa saja. Metode ini digunakan sebagai acuan pengukuran tingkat ketahanan dan kerentanan pangan di setiap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Provinsi, dan Badan Ketahanan Pangan di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) yang berupa analisis indikator individu, analisis komposit, Analisis Spasial, dan Analisis Deskriptif. Analisis FSVA bertujuan untuk menjawab tujuan pertama untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan berdasarkan enam indikator yang kemudian dipetakan berdasarkan data yang telah didapatkan. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjawab tujuan kedua dengan medeskripsikan dampak Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang.

Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan range delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Berikut adalah penilaian indikator berdasarkan kategori yang mengacu pada Badan Ketahanan Pangan (2019), yaitu:

Sangat Rawan	=> 1
Rawan	=> 2
Agak rawan	=> 3
Cukup tahan	=> 4
Tahan	=> 5
Sangat Tahan	=> 6

Analisis Komposit

Setelah melakukan analisis indikator individu, analisis selanjutnya adalah analisis komposit. Pendekatan metodologi yang dipakai untuk analisis komposit menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan atau 6 indikator yang telah ditentukan. Nilai bobot 1/3 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 6 indikator lainnya secara proposional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Analisis Spasial

Pemetaan daerah ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Malang menggunakan pendekatan GIS yang didapat dari kumpulan data sekunder selanjutnya diolah menggunakan Ms. Excel. Data yang telah diolah kemudian ditransformasikan berdasarkan sembilan indikator ketahanan dan kerawanan pangan yang telah ditentukan. Data pada excel selanjutnya ditransformasikan menjadi data ketahanan dan kerentanan pangan yang dapat dibaca melalui gambaran peta dengan menggunakan *software* GIS. Sebelum melakukan pemetaan, penelitian ini harus mengelompokkan kabupaten ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan lalu dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit.

Tabel 1. *Cut off point* Komposit

Kelompok IKP	
Prioritas 1	Sangat Rentan
Prioritas 2	Rentan
Prioritas 3	Agak Rentan
Prioritas 4	Agak Tahan
Prioritas 5	Tahan
Prioritas 6	Sangat Tahan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami yang berbentuk informasi yang lebih ringkas (Ashari, *et al*, 2017). Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan di Kabupaten Malang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dampak Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) terhadap tingkat ketahanan pangan dan keterangan mengenai kondisi actual tingkat produksi, produktivitas, luas panen, luas lahan padi, dan ketahanan pangan yang terjadi di Kabupaten Malang berdasarkan data-data skunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Ketahanan Pangan Kecamatan di Kabupaten Malang

Rasio Luas Baku Lahan Sawah terhadap Luas Wilayah

Kondisi indikator rasio luas lahan sawah Kabupaten Malang masuk ke dalam prioritas 3 berdasarkan hasil pengujian FSVA tahun 2018 dan tahun 2019. Kondisi rasio luas baku lahan sawah di Kabupaten Malang terkendala dengan kebijakan RTRWnya, yaitu Kec. Poncokusumo, selain itu juga terdapat perbandingan luas sawah yang kecil dengan luas wilayah kecamatan yang sangat jauh (DKP Kab. Malang, 2019). Kecamatan Poncokusumo masuk dalam prioritas 1 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan luas sawah seluas 1.468 ha

dengan luas wilayah 10.299 ha pada tahun 2018 yang berarti kecamatan ini hanya memiliki sekitar 10% lahan sawah dari total luas wilayah kecamatannya (BPS Kab. Malang, 2019). Selain itu terjadi penurunan luas lahan padi yang menurun tiap tahunnya, tahun 2013 luas lahan padi di Kabupaten Malang seluas 49.474 ha menjadi 45.888 pada tahun 2018 (BPS Kab. Malang, 2019). Hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan. Salah satunya Kecamatan Pujon yang masuk ke dalam prioritas 3 (agak rentan), penurunan luas lahan disebabkan ahli fungsi lahan padi menjadi pemukiman dan alih komoditas menjadi komoditas hortikultura (DKP Kabupaten Malang, 2019).

Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

Kecamatan-kecamatan yang dikelompokkan di prioritas 1-3 di Kabupaten Malang hanya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Malang saja, sehingga terdapat kemungkinan nilai-nilai terendah di Kabupaten Malang mungkin dapat menjadi prioritas yang lebih baik di Kabupaten lain yang nilai secara umumnya berada di bawah Kabupaten Malang. Berdasarkan Data Potensi desa (Podes) 2018, Kabupaten Malang memiliki 42.661 sarana dan prasarana penyedia pangan jika dibandingkan dengan Kabupaten Kediri memiliki 22.823 unit (BPS, 2018). Secara keseluruhan indikator rasio sarana dan prasarana pangan dari hasil uji FSVA 2018 dan 2019 masuk dalam prioritas 3. Namun berdasarkan Analisa komposit/menyeluruh untuk mengetahui kerentanan terhadap ketahanan pangan di kecamatan diketahui bahwa tidak ada satupun kecamatan yang masuk kedalam kategori prioritas 1 sangat rawan terhadap ketahanan pangan.

Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

Sebaran rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kabupaten Malang masuk kedalam prioritas 3 (agak rawan) berdasarkan hasil uji FSVA tahun 2018 dan 2019 sehingga tidak dapat perubahan sama sekali. Hal ini disebabkan masih banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan pangan) dibandingkan dengan prioritas 4-6 (tahan pangan). Namun tidak seluruh kecamatan yang dikelompokkan di prioritas 1 memberikan dampak kerentanan terhadap ketahanan pangan pada daerah tersebut, hal ini bisa dilihat dari hasil uji FSVA analisis komposit tahun 2018 terdapat 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampelgading, Pagak dan Pujon dan pada tahun 2019 terdapat 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpang yang masuk ke dalam prioritas 1 dalam indikator ini namun secara komposit masuk kedalam status tahan pangan (prioritas 4-6). Berdasarkan Data Terpadu PPFM, jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1) Kecamatan Tumpang yaitu sebanyak 2.790 jiwa dengan total penduduk 78.657 jiwa (TNP2K, 2019). Kecamatan Pujon masuk kedalam prioritas 1 dalam indikator ini selain karena tingginya jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah, tapi terdapat dua desa yang masuk dalam kelompok rawan stunting, yaitu Desa Pujon Kidul dan Desa Wiyurejo (Nana, 2018).

Akses Transportasi

Berdasarkan hasil uji FSVA tahun 2018 menggunakan data PODES 2018 di Kabupaten Malang, hampir semua kecamatan indikator rasio akses jalan yang memadai masuk dalam prioritas 4, berarti 30 kecamatan yang memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda sepanjang tahun kecuali 3 kecamatan, yaitu kecamatan Wajak, Kromengan, dan Pakis yang masuk ke dalam prioritas 3. Pada hasil uji FSVA tahun 2019, Kabupaten Malang hanya memiliki 1 kecamatan yang masuk dalam prioritas 3, yaitu kecamatan wagir. Hal ini menandakan bahwa seluruh wilayah di Kabupaten Malang secara umum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 secara terus menerus sepanjang tahun, namun terjadi perbaikan antara tahun 2018 dengan 2019 yang awalnya ada 3 kecamatan menjadi 1 kecamatan yang masuk dalam prioritas 1. Hal ini dikarenakan adanya penurunan jumlah jalan yang mengalami rusak dan

rusak berat tahun 2017 mencapai 562,10 Km berkurang menjadi 537,85 Km pada tahun 2018 (BPS Kab. Malang, 2019).

Rasio Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih

Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih masuk dalam prioritas 3 pada tahun 2018 dan 2019. Terdapat 2 kecamatan yang masuk kedalam prioritas 2 dalam analisis komposit ketahanan pangan, yaitu Kecamatan Kasembon dan Gedangan. Maka 2 kecamatan ini dapat dijadikan sebagai lokasi utama dalam pengambil kebijakan untuk peningkatan ketahanan pangan khususnya dalam peningkatan fasilitas akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan data PPFM tahun 2019, Kecamatan Kasembon memiliki 1.438 rumah tangga tanpa akses air bersih, Kecamatan Gedangan 2.331 rumah tangga tanpa air bersih (TNP2K, 2019).

Rasio Tenaga Kesehatan

Hasil dari uji FSVA indikator rasio tenaga kesehatan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah dan tingkat prioritas tiap tingkatnya pada tahun 2018 dan 2019, namun ada perbedaan kecamatan di tiap prioritas karena adanya peningkatan ataupun penurunan tingkat prioritas. Kab. Malang secara menyeluruh pada indikator masuk dalam prioritas 3. Terdapat 2 kecamatan yang memberikan dampak yang cukup kuat pada analisis komposit untuk mengetahui tingkat kerentanan ketahanan pangan, yaitu Kecamatan Ampelgading, dan Tirtoyudo. Kedua kecamatan ini masuk prioritas 2 dalam analisis komposit. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah tenaga kesehatan di kecamatan tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya. Kecamatan Tirtoyudo memiliki 40 tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk 74.836 jiwa, dan Kecamatan Ampelgading memiliki 38 tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk 66.527 (BPS Kab. Malang, 2020).

Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Malang

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Malang antara tahun 2018 dan 2019. Secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Malang pada tahun 2018 dan 2019 masuk ke dalam prioritas 4 yang berarti agak tahan, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan, perbedaan mungkin terletak perbedaan jumlah kecamatan pada tiap prioritasnya, namun tidak ada kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 atau sangat rentan pangan. Namun berbeda dengan hasil FSVA nasional tahun 2018, Kab. Malang masuk dalam prioritas 6 (BKP, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten malang merupakan secara garis besar pada kondisi tahan pangan.

Dampak Program UPSUS PAJALE terhadap Tingkat Ketahanan Pangan di Kabupaten Malang

Program Upsus pajale di Kabupaten Malang memperoleh hasil cukup yang baik, dilihat dari data produksi, produktivitas, luas lahan dan luas panen di Kabupaten Malang. Data Produksi, Produktivitas, dan Luas Lahan Padi Tahun 2014-2018 bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 18. Data Produksi, Produktivitas, dan Luas Lahan Padi Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Kecamatan	Sebelum UPSUS		Saat UPSUS			Selisih	
		2014	2015	2016	2017	2018	Ha/Ton	%
1	Kecamatan dengan UPSUS							
	Produksi (ton)	80.290	83.588	93.504	84.113	96.982	16.692	17,2 %
	Produktivitas (ha/ton)	67,34	70	69,81	69,33	69,66	2,32	3,3 %
	Luas lahan (ha)	5.002	5.002	5.002	5.002	5.002	0	0%
2	Kecamatan non-UPSUS							
	Produksi (ton)	381.016	395.342	411.631	409.684	401.174	20.158	5 %
	Produktivitas (ha/ton)	68,02	70,93	70,94	68,45	70,84	28,12	4 %
	Luas lahan (ha)	40.388	40.388	40.388	40.388	40.388	0	0 %
3	Kabupaten Malang							
	Produksi (ton)	461.306	478.930	505.137	493.797	498.157	36.851	7 %
	Produktivitas (ha/ton)	66,81	70,81	70,81	70,36	71,07	4,26	6 %
	Luas lahan (ha)	45.888	45.888	45.888	45.888	45.888		0 %

Dampak yang signifikan adalah produksi terjadi peningkatan sebesar 17,2% di kelompok kecamatan yang mendapatkan bantuan program UPSUS, 5 % di kelompok kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan, dan 7% di Kabupaten Malang. Peningkatan produksi juga mempengaruhi peningkatan produktivitas, namun tidak mempengaruhi peningkatan areal luas lahan padi di Kabupaten Malang. produktivitas meningkat lebih baik di kelompok kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan dan Kabupaten Malang, yaitu sebesar 4 % dan 6 %, dibandingkan dengan kelompok kecamatan yang mendapatkan bantuan, yaitu 3,3 %. Hal ini menunjukkan adanya dampak program UPSUS terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Luas lahan padi tidak mengalami perubahan luas areal, kelompok kecamatan yang mendapatkan bantuan program UPSUS, tidak yang mendapatkan bantuan dan Kabupaten Malang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan luas lahan sawah, sehingga selama 5 tahun terakhir kabupaten Malang tidak mengalami penurunan jumlah luas lahan sawah.

Kelompok kecamatan yang mendapatkan bantuan UPSUS dan yang tidak mendapatkan bantuan memiliki tingkat ketahanan pangan yang sama, yaitu prioritas 4, sehingga program ini berdampak tidak secara langsung terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Program ini paling berkontribusi pada ketersediaan pangan karena program-programnya menunjang peningkatan produksi pangan yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Dalam peningkatan bidang perekonomian mempengaruhi akses dan pemangsaan pangan, program upsus berkontribusi dilihat dari peningkatan PDRB Kabupaten Malang pada sektor pertanian, kehutanan dan kelautan pada tahun 2015-2018 dari 13.259,14 miliar menjadi 15.129,25 miliar. Hal ini serupa dengan hasil upsus pajale di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada komoditas padi berdampak pada peningkatan PDRB subsektor tanaman pangan. Peningkatan produksi padi akan mempengaruhi peningkatan PDRB subsektor tanaman pangan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 51 persen (Busyra, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Uji FSVA pada uji komposit Kabupaten Malang masuk pada kondisi agak tahan pangan (prioritas 4), sehingga secara keseluruhan tidak ada perbedaan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Malang antara tahun 2018 dan 2019. Tidak terdapat kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 hanya ada beberapa kecamatan yang masuk prioritas 2 dan 7 kecamatan masuk kedalam prioritas 3. Walaupun tidak mengalami peningkatan, Kabupaten Malang masih dalam kondisi tahan pangan.

Program upaya khusus pajale di Kabupaten Malang memperoleh hasil cukup yang baik, dilihat dari data produksi, produktivitas, luas lahan dan luas panen di Kabupaten Malang. Kelompok kecamatan yang mendapatkan bantuan UPSUS dan yang tidak mendapatkan bantuan memiliki tingkat ketahanan pangan yang sama, yaitu prioritas 4, sehingga program ini berdampak tidak secara langsung terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Program ini paling berkontribusi pada ketersediaan pangan karena program-programnya menunjang peningkatan produksi pangan yang mempengaruhi ketersediaan pangan.

Saran

Penelitian selanjutnya terkait ketahanan pangan tingkat kabupaten diharapkan menggunakan data hingga per desa, agar memaksimalkan penelitian yang dilakukan, dan bisa menambah atau mengganti indikator demi mempermudah penelitian. Untuk Pemerintah, pengoptimalan program upsus dapat dilakukan dengan cara pengecekan daerah yang masuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3), terutama pada kelompok kecamatan atau daerah yang masuk dalam kategori rentan pangan pada indikator rasio lahan sawah dan pemberian bantuan ataupun penyuluhan dilakukan secara merata dan tepat sasaran, dan Untuk Pemerintah, peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan memfokuskan penanganan ketahanan pangan di wilayah yang masuk ke dalam prioriats 1-3 (rentan rawan pangan), wilayah yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten atau di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain, dan desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas. Program-program yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal, pembukaan lahan pertanian baru atau lahan mati, penanganan kemiskinan, peningkatan akses air bersih, dan penyediaan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari B. H., S. F. Persada, dan B. M. Wibawa. 2017. Analisis Deskriptif dan Tabulasi Silang Pada Konsumen *Online shop* di Instagram (Studi Kasus 6 Universitas di Kota Surabaya). *J. Sains dan Seni ITS* Vol. 6(1): 17-21.
- Badan Ketahanan Pangan, 2019. Panduan Penyusunan Peta Ketahanan pangan (*Food Securitu and Vulnerability Atlas – FSVA*) Kabupaten 2019. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Badan Ketahanan Pangan. 2018. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Timur, *Food Security and Vulnerability Atlas of East Java (FSVA)*. Jakarta:Badan Ketahanan pangan.
- BPS. 2018. Data Potensi Desa Tahun 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- BPS Kab. Malang. 2019. Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2019. Malang: BPS Kab. Malang

- Busyra, Rezky Gumala. 2016. Dampak Program Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai (PAJALE) pada Komoditas Padi terhadap Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *J. Media Agribisni (MeA)* Vol. 1 (1): 12-27.
- DPK Kab. Malang. 2019. Peta Ketahanan dan Kerentanan Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2019. Malang: Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.
- Masitoh, F., dan V. Ratnasari. 2016. Pemodelan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Metode Regresi Probit Biner. *J. Sains dan Seni ITS* Vol. 5 (2): 211-216.
- Nana, D. 2018. Data Stunting di Kabupaten Malang Membingungkan, Banyak Pihak Dibuat Tercengan. Diakses di <https://www.malangtimes.com> pada tanggal 9 Agustus 2020.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan di Kabupaten Malang. Diakses dari <http://bdt.tnp2k.go.id> pada tanggal 7 April 2020.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Sumber Air Minum dengan Status Kesejahteraan 40% terendah di Indonesia di Kabupaten Malang. Diakses dari <http://bdt.tnp2k.go.id> pada tanggal 7 April 2020.
- Wijaya, O., C. P. Nugroho, R. Mutisari, R. Asmara dan Fahriyah. 2016. Analisis Daerah Rawan Pangan dengan Pendekatan *Geographical Information System* (GIS) di Kota Probolinggo. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.